

KERTAS POSISI BENCANA EKOLOGIS DI RIAU



DISUSUN OLEH :
RAFLIS
M. TEGUH SURYA
RIKO KURNIAWAN
SUSANTO KURNIAWAN



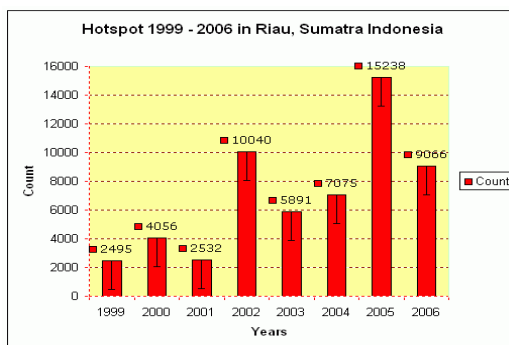
BENCANA EKOLOGIS DI RIAU “BUAH KEBERHASILAN PEMBANGUNAN”

A. LATAR BELAKANG

Bencana ekologis tahunan seperti kabut asap dan banjir telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi negeri ini. Hal ini merupakan sebuah indikator termudah untuk melihat bahwa tingkat kerusakan lingkungan hidup di Riau sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan. Sayangnya pemerintah Riau tidak memiliki sense of disasters, sehingga bencana yang telah banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi ini dianggap bencana biasa saja.

Penanganan bencana yang dilakukan pemerintah selama ini hanya terbatas pada bantuan belaka dan sama sekali tidak menyentuh kepada langkah-langkah penyelesaian masalah. sehingga terkesan bencana yang sangat tidak diinginkan oleh rakyat ini, sangat dinantikan kehadirannya oleh para penyelenggara Negara di negeri ini.

Bantuan yang seharusnya diberikan buat para korban cenderung dikorupsi, sehingga masyarakat kembali menjadi korban yang dikorbankan untuk kepentingan segelintir orang. Bahkan para aktor elit politik menjadikan bencana sebagai media kampanye untuk merebut kursi kekuasaan pada tahun 2009.



Bencana kabut asap yang terjadi dalam kurun waktu 1999-2006 semakin meningkat secara drastis, ini menunjukkan bahwa proses penanganan bencana kabut asap tidak dilakukan secara serius. Izin-izin konversi hutan masih saja diterbitkan dalam jumlah besar, bahkan sebagian besar izin konsesi berada pada kawasan lindung gambut¹, sehingga ketika terjadi praktek land clearing, bencana kabut asap tak bisa dihindari.

Kebakaran hutan selama tahun 2006 tersebar hampir diseluruh kabupaten di Propinsi Riau, namun yang terbesar terjadi di kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Pelalawan (lihat Peta sebaran Hotspot di Riau July 2006)². Sebagian besar kawasan yang terbakar merupakan kawasan gambut yang merupakan sumber terbesar polusi asap dalam kebakaran-kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Pada periode Juli - Agustus 2006 telah teridentifikasi bahwa kebakaran terjadi dikawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Produksi (HPH) dan perkebunan sawit di seluruh Riau, dengan rincian luasan terbakar HTI seluas 47.186 ha, perkebunan sawit seluas 42.094 ha, HPH seluas 39.055 ha, kawasan gambut 91.198 ha, kawasan non gambut: 82.503 ha.

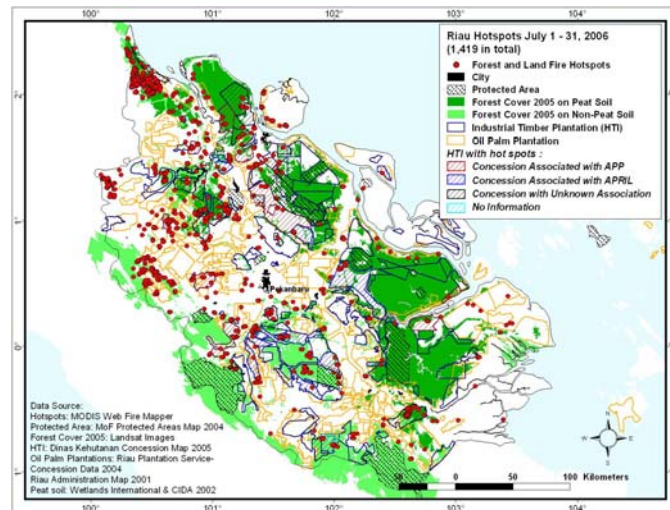
¹ Laju konversi hutan alam Riau untuk hutan tanaman industri dan perkebunan sawit sebar 150.00-200.000 Ha per tahun dan 4 juta hektar daratan Riau terdiri dari lapisan gambut dengan kedalaman yang beragam. Lahan-lahan gambut yang digenangi air tidak akan terbakar secara alami kecuali mengalami kekeringan yang luar biasa. Propinsi Riau dalam kurun waktu dua tahun terakhir telah kehilangan hutan rawa gambut seluas 2 juta hektar

² ZULFAHMI, Desember 2006 “Paper Untuk Berita FKKM”

Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat ketika bencana kabut asap datang adalah gangguan kesehatan, dimana sejak Mei - September 2006 bencana kabut asap telah mengakibatkan 12.000 orang terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan), 3.000 orang terkena iritasi mata, dan 10.000 orang terkena diare dan menceret³. Bahkan sebuah studi terbaru memperkirakan bahwa karbon yang dilepas selama kebakaran-kebakaran lahan gambut pada tahun 1997/98 sama jumlahnya dengan 13 sampai 40% dari emisi tahunan yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil di seluruh dunia. (Burning issues, Mei 2003)

Bencana banjir tidak kalah pentingnya dibanding dengan bencana kabut asap yang datang silih berganti. Banjir yang terjadi pada tahun 2003 telah menimbulkan total kerugian sebesar 793,3 miliar rupiah, dimana kerugian yang dialami oleh masing-masing kabupaten terkena banjir adalah sebesar 31% dari nilai APBD nya⁴.

Seperti halnya bencana kabut asap, bencana banjir juga disebabkan oleh menurunnya kualitas lingkungan hidup beserta rusaknya daya dukung lingkungan yang selama ini menjadi faktor keseimbangan alam. Kondisi hutan di bagian hulu yang sudah rusak mengakibatkan proses run-off air hujan tidak dapat dihambat. Proses run-off akan menggerus lapisan hara tanah dan membawa partikel tanah tersebut ke hilir, sehingga terjadi pengendapan dan pendangkalan sungai⁵, yang mana ketika musim hujan tiba kedua faktor tersebut terakumulasi menjadi banjir. Dalam hal ini musim penghujan hanya sebagai pemicu terjadinya banjir dan bukan menjadi faktor utama, jadi hal yang paling tepat dilakukan pemerintah untuk mengurangi bencana banjir adalah dengan melakukan perbaikan secara menyeluruh di kawasan-kawasan hulu sungai dan merestorasi sungai-sungai yang telah mengalami pendangkalan dan pengrusakan.



B. STUDI KASUS “BENCANA BANJIR DI RIAU 2006”

Banjir secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tidak sanggupnya saluran air seperti sungai menampung dan mengalirkan air dari aliran permukaan yang disebabkan oleh hujan. Secara teoritis penyebab utama terjadinya banjir adalah tingginya curah hujan yang mengakibatkan besarnya volume aliran permukaan yang kemudian terakumulasi pada daerah-daerah cekungan (bantaran sungai) yang tidak mampu mengalirkan air dalam volume yang besar.

Besarnya aliran permukaan yang disebabkan oleh hujan dan jatuh ke permukaan tanah

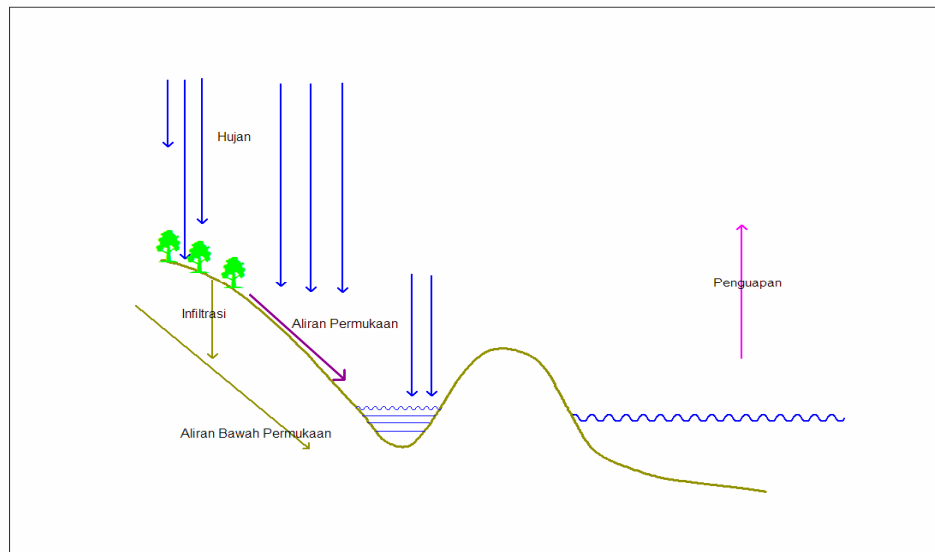
³ Catatan akhir tahun 2006, JIKALAHARI

⁴ WALHI Riau, 2003. Buku Hitam “Banjir Salah Siapa”

⁵ Empat Daerah Aliran Sungai besar di Riau yang paling menentukan dalam setiap kali terjadinya bencana banjir yaitu DAS Siak yang 100% berada di Provinsi Riau, DAS Rokan 15% berada di Sumatera Utara, 5% di Sumatera Barat dan sisanya 75% di Riau. DAS Kampar 8% berada di Sumatera Barat dan sisanya 92% di Riau, sedangkan DAS Indragiri 32% di Sumatera Barat dan sisanya 72% di Riau (BP DAS Riau, 2005)

hampir seluruhnya berubah menjadi aliran permukaan, sangat sedikit yang diteruskan kedalam tanah dalam proses infiltrasi.

Kecilnya proses infiltrasi yang terjadi disebabkan oleh tutupan lahan yang telah berubah peruntukannya secara masif dan saat ini lahan-lahan yang seharusnya tetap dipertahankan keberadaannya sebagai sebuah kawasan hutan yang berfungsi sebagai water catchment area sudah didominasi oleh kebun sawit, hutan tanaman industri, dan lahan terbuka. Sehingga pada musim kemarau permukaan tanah cenderung kering dan memadat dan pada saat musim hujan tiba tanah tidak mampu mengalirkan air dari permukaan menuju aliran bawah permukaan sehingga hampir 100% diubah menjadi aliran permukaan.



Gambar. 3 Proses Yang Terjadinya Ketika Hujan Turun

1. Tinjauan Perubahan Pola Tutupan Lahan

Terjadinya perubahan pola tutupan hutan dari hutan alam menjadi hutan tanaman industri dan perkebunan sawit menyebabkan terganggunya keseimbangan hidrologis yang kemudian berdampak pada mengecilnya debit air sungai pada musim panas dan membesarnya debit air pada musim hujan yang kemudian berdampak pada terjadinya banjir.

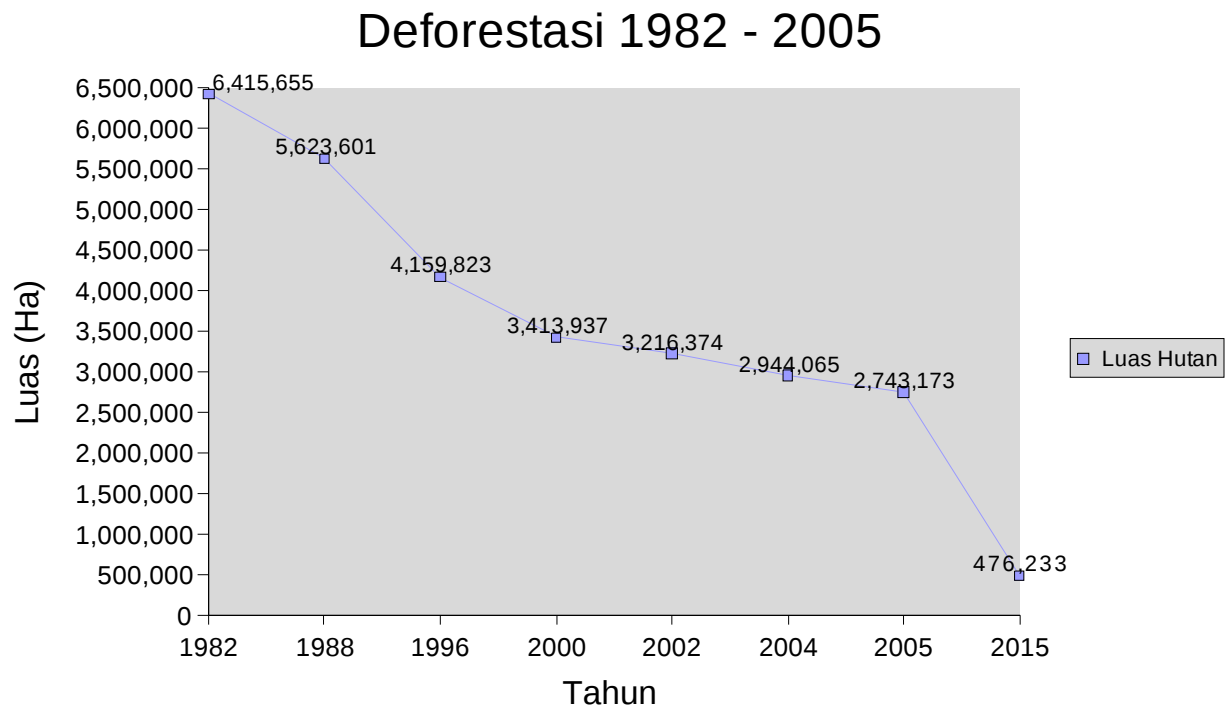
Salah satu fungsi hutan alam adalah sebagai pengatur siklus hidrologi menjadi penting dalam pola pencegahan terjadinya banjir. Air hujan yang jatuh pada tajuk pohon akan mengurangi energi kinetik hujan yang mencapai permukaan tanah. Sebagian air yang jatuh akan mengalir melalui batang dan memperlambat terjadinya proses aliran permukaan. Air yang sudah sampai pada permukaan tanah sebagian akan diteruskan (diinfiltrasikan) ke lapisan bawah permukaan dan akan mengurangi aliran permukaan. Kerapatan pohon akan memperlambat laju aliran permukaan sampai pada saluran pembuangan (sungai).

Pengurangan aliran permukaan akibat proses infiltrasi dan terjadinya waktu tunda atau perlambatan aliran permukaan mengakibatkan perbedaan waktu tempuh dari aliran permukaan menuju saluran pembuangan mengurangi lonjakan-lonjakan massa air pada saluran air dapat dikurangi sehingga banjir dapat dieliminasi.

2. Tinjauan Laju Kerusakan Hutan Alam Riau⁶

Proses Deforestasi dan degradasi hutan alam di Propinsi Riau berlangsung sangat cepat. Selama kurun waktu 24 tahun (1982-2005) Propinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 Juta ha.

Pada tahun 1982 tutupan hutan alam di Provinsi Riau masih meliputi 78% (6.415.655 hektar) dari luas daratan Propinsi Riau 8.225.199 Ha (8.265.556,15 hektar setelah dimekarkan). Hingga tahun 2005 hutan alam yang tersisa hanya 2,743,198 ha (33% dari luasan daratan Riau). Dalam Kurun waktu tersebut provinsi Riau rata-rata setiap tahun kehilangan hutan alam-nya seluas 150 Ribu Ha dan selama periode 2004 - 2005 hutan alam yang hilang mencapai 200 ribu ha. Lihat grafik perubahan tutupan hutan alam Riau.



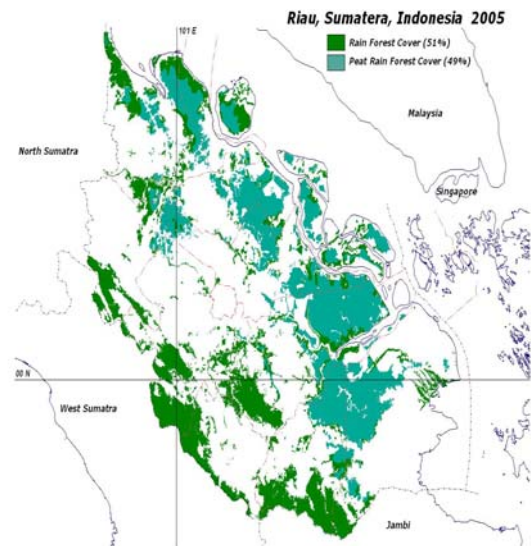
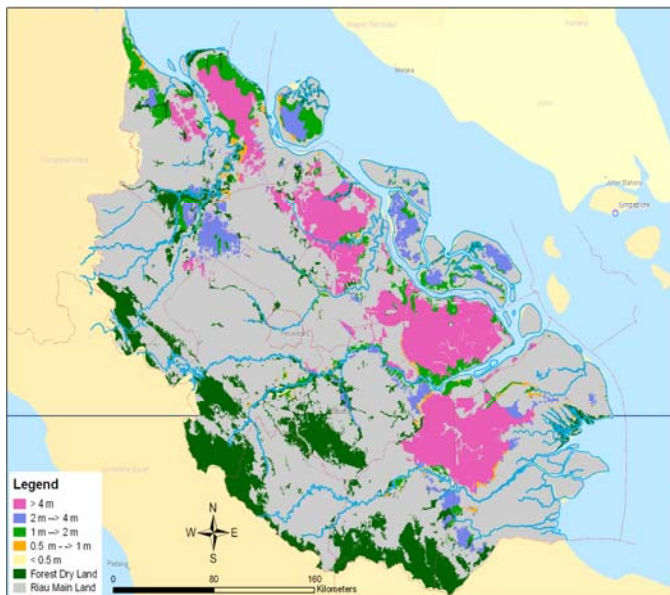
Degradasi hutan yang terjadi pada tahun 1990-an cukup dramatis, dimana hutan alam dataran kering di propinsi Riau berkurang hampir setengahnya, sementara hal yang serupa tidak terjadi pada hutan lahan basah, meskipun perluasan perkebunan di Indragiri Hilir, dan penebangan di Pelalawan dan Siak menunjukkan bahwa deforestasi juga terjadi namun dengan lambat, hal ini kemungkinan disebabkan daerah rawa lebih sulit dicapai dan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk menebangnya (Town line, Master Plan Riau 2020, 2003)

Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa perbandingan citra satelit, dari perbandingan ini menunjukkan bahwa kawasan hutan berkurang terus menerus, kawasan pertama yang menjadi sasaran adalah hutan tanah kering yang mudah dicapai dari jalan raya dan daerah-daerah yang berada dekat aliran sungai seperti daerah Kuala Gaung, Dumai, Rokan Hulu dan Rokan Hilir.

⁶ Zulfahmi, "Hutan Riau Diambang Kepunahan"

KERTAS POSISI BENCANA EKOLOGIS DI RIAU

Dari interpretasi Citra Satelit tahun 2005 hutan alam tanah kering di propinsi Riau diperkirakan hanya tersisa 1.057.139 ha. Hutan-hutan ini berada pada Blok Bukit Tiga Puluh, Blok Teso Nilo dan Blok Bukit Rimbang Baling, lihat peta dibawah ini.



Sementara hutan alam lahan basah (Hutan gambut) yang tersisa seluas 1.937.279 Ha. hutan lahan basah ini berada pada Blok Kerumutan, blok Semenanjung Kampar, blok Bukit Batu dan blok Rokan Hilir (Lihat peta hutan lahan basah yang masih tersisa di riau tahun 2005). WWF Indonesia menyebutkan bahwa 8 blok hutan alam yang tersisa ini adalah hutan alam yang memiliki nilai konservasi tinggi (High Conserve Value Forest).

Semenjak hutan alam dikelola untuk tujuan komersial yang di usahakan oleh pihak swasta berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1967, jutaan meter kubik kayu alam setiap tahunnya mengalir keluar dari hutan alam Riau. Semenjak saat itu pula satu persatu tajuk-tajuk pohon mulai tumbang dan menghilang.

Dari udara mulai terlihat tanah-tanah merah, lapisan-lapisan hijau segar yang dulu menutupinya menghilang. Kayu-kayu ini dikirim ke ratusan industri kayu yang beroperasi di Riau dan juga tidak sedikit kayu-kayu ini yang diseludupkan keluar negeri dengan tujuan Singapura dan Malaysia.

Sektor kehutanan Riau telah berkontribusi 10 hingga 15 % bagi PDRB tahun 2001 atau sekitar 4 triliun rupiah (Buku masterplan Riau Kusuma wati 2001). Angka ini belum termasuk sektor hilir industri kehutanan. Sekitar 55.000 orang bekerja secara penuh pada sektor kehutanan, Jika dimasukan pekerja paruh waktu dan pekerja tidak menerima upah sektor ini dipekirakan mempekerjakan lebih dari 100.000 orang. (sensus 2000 dalam masterland hutan riau 2003)

Akibat buruknya sistim pengelolaan sumber daya hutan selama ini sehingga proses deforestasi terus berlangsung seakan tanpa dapat dikendalikan. Satu persatu industri kehutanan bangkrut, puluhan bahkan ratusan ribu orang yang mengantungkan hidupnya dari sektor kehutanan terancam kehilangan pekerjaan. Penerimaan keuangan negara dan daerah terus berkurang dari sektor kehutanan, bencana ekologis datang secara bergantian seiring dengan hilangnya tutupan hutan alam.

Keberadaan menjamurnya industri kehutanan di propinsi Riau telah menjadi salah satu penyebab degradasi hutan alam semakin tidak terkendali. Sampai dengan tahun 2000 jumlah Industri kehutanan yang beroperasi di Propinsi Riau mencapai 312 unit yang terdiri dari Industri kayu lapis (plywood) 10 unit, sawmil 270 unit, moulding 27, chip mill sebanyak 3 unit dan 2 unit industri Pulp dan Kertas. Keseluruhan industri ini berkapasitas 4,9 juta ton/tahun dengan kebutuhan kayu mencapai 15,8 juta m³/tahun. Pada hal kemampuan produksi hutan alam saat itu hanya sekitar 1,1 juta m³/tahun (Kanwil kehutanan Riau 1999).

Kemudian pada tahun 2005 Dinas kehutanan Propinsi Riau mencatat terjadi peningkatan jumlah dan kapasitas industri kehutan di Riau menjadi 576 Unit dengan kebutuhan bahan baku menjadi 22,7 juta M³/tahun⁷. Data ini cukup mengagetkan dengan kenyataan yang terjadi pada tahun 2000 semestinya industri kehutanan di Riau di kurangi

Table. 1 Keadaan Industri Primer Hasil Hutan Propinsi Riau s.d. 2005.

NO	Jenis Industri	Jumlah (Unit)	Kapsitas terpasang		Kebutuhan bahan baku	
					BBS	Pertukangan
1	Pulp & Paper	2	3.910.000	Ton/thn	17.595.000	904.417
2	Chip mill	2	296.000	Ton/thn	325.600	
3	Plywood	9	542.650	M ³ /thn		
4	Sawn Timber					
	- Ijin Perindag	456	1.592.184	M ³ /thn		3.184.368
	- Ijin Kab/Kota	103	261.500	M ³ /thn		523.000
5	Arang bakau	4	33.970	M ³ /thn		152.865
	Jumlah	576			17.920.600	4.764.650
Total Kebutuhan bahan baku						22.685.250

Sumber; Dinas kehutanan Propinsi Riau 2006

Peningkatan kapasitas mesin secara signifikan terjadi pada sektor industri pulp & paper, dimana pada tahun 1990-an kapasitas industri pulp and Paper (PT. Riau Andalan Pulp and Paper dan PT. Indah Kiat Pulp and Paper) sebesar 2,5 juta ton/tahun, meningkat menjadi 3,9 juta ton/tahun pada awal tahun 2000-an. peningkatan kapasitas produksi mesin kedua industri pulp ini secara signifikan juga meningkatkan kebutuhan kayu oleh industri kehutanan di Riau.

Sehingga pada tahun 2002 pemerintah telah mengeluarkan perizin untuk HTI pulp seluas 1,4 juta Ha, dengan harapan dapat mensuplay sekitar 18 juta m³ kebutuhan kayu Industri Pulp and Paper yang beroperasi di Riau (PT. RAPP dan PT. IKPP) Hingga tahun 2005 kemampuan produksi HTI ini baru mencapai 3,5 juta M³ (Dinas kehutanan Riau tahun 2006). Issu persediaan kayu untuk industri pulp & paper di Riau menunjukkan kekeliruan besar dalam perencanaan dan investasi

3. Tinjauan RTRWP Riau Tahun 1994

PERDA No. 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Popinsi 1994-2009 telah diatur alokasi pemanfaatan ruang, dimana lahan seluas 2.854.687 Ha (31,78%) dialokasikan untuk kawasan kehutanan dengan status hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap, serta kawasan lindung seluas 1.942.744 Ha (21,63%). Dengan luasan tutupan lahan dalam bentuk hutan seluas 4.797.432 Ha atau (53,41%). Seharusnya pada tahun 2009 masih tersisa

⁷ Makalah Gubernur Propinsi Riau 2006

hutan alam seluas 4.797.432 Ha (53,41%) sehingga sistim hidrologi masih bisa terjaga dengan baik.

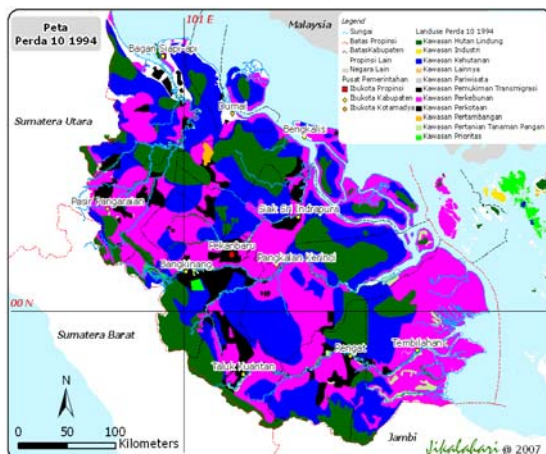
Tabel. 2 Alokasi Pemanfaatan Lahan Berdasarkan RTRWP Tahun 1994

No	Alokasi Pemanfaatan Lahan	Luas (Hektar)	%	Keterangan
1	Kawasan Hutan Lindung	1.942.744	21.63	Hidrologi baik
2	Kawasan Industri	-	-	-
3	Kawasan Kehutanan	2854687	35.63	Hidrologi baik
4	Kawasan Lainnya	428876	4.77	-
5	Kawasan Pariwisata			-
6	Kawasan Pemukiman dan Transmigrasi	234.903	2.61	-
7	Kawasan Perkebunan	3.200.868	35.63	Hidrologi tergantung Jenis Tanaman
8	Kawasan Perkotaan	-	-	-
9	Kawasan Pertambangan	15.691	0.17	-
10	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	111.178	1.24	-
11	Kawasan Prioritas	22.697	0.25	-
Total		8.811.648	100%	

3.1 Alokasi Pemanfaatan Ruang Empat DAS Besar di Riau

Implementasi dari PERDA No. 10 tahun 1994 tentang RTRWP dalam perjalanannya mengalami banyak penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi adalah dengan mengeluarkan izin/ rekomendasi kepada Perkebunan, HPH dan HTI, diluar alokasi pemanfaan ruang yang telah direncanakan dalam PERDA No 10 tahun 1994, beberapa izin diantaranya berada dalam kawasan lindung

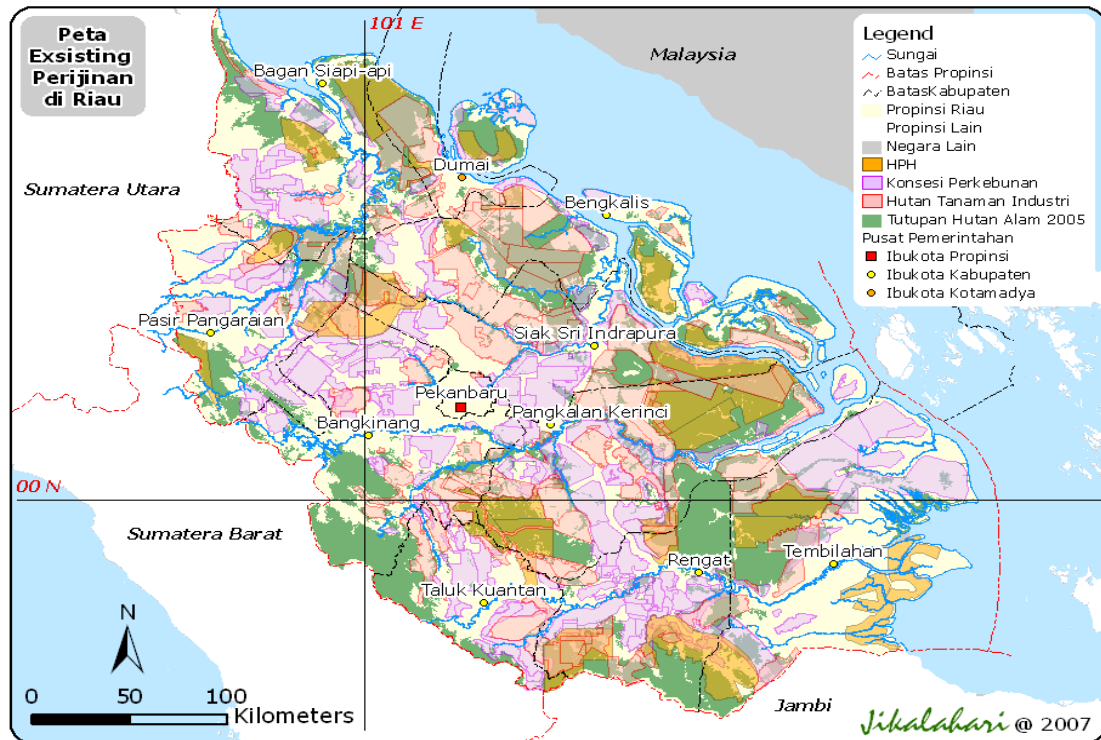
Dalam perkembangannya kemudian, pemerintah tetap memberikan izin-izin bagi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit pada kawasan kehutanan, sehingga bisa dikatakan hampir tidak ada hutan alam yang bisa disisakan selain kawasan konservasi yang juga mengalami proses deforestasi yang dilegalkan lewat izin konsesi dan konversi. Hal itu terjadi karena pemerintah daerah (Bupati dan Gubernur) sangat berperan dalam pemberian rekomendasi beroperasinya perusahaan-perusahaan tersebut



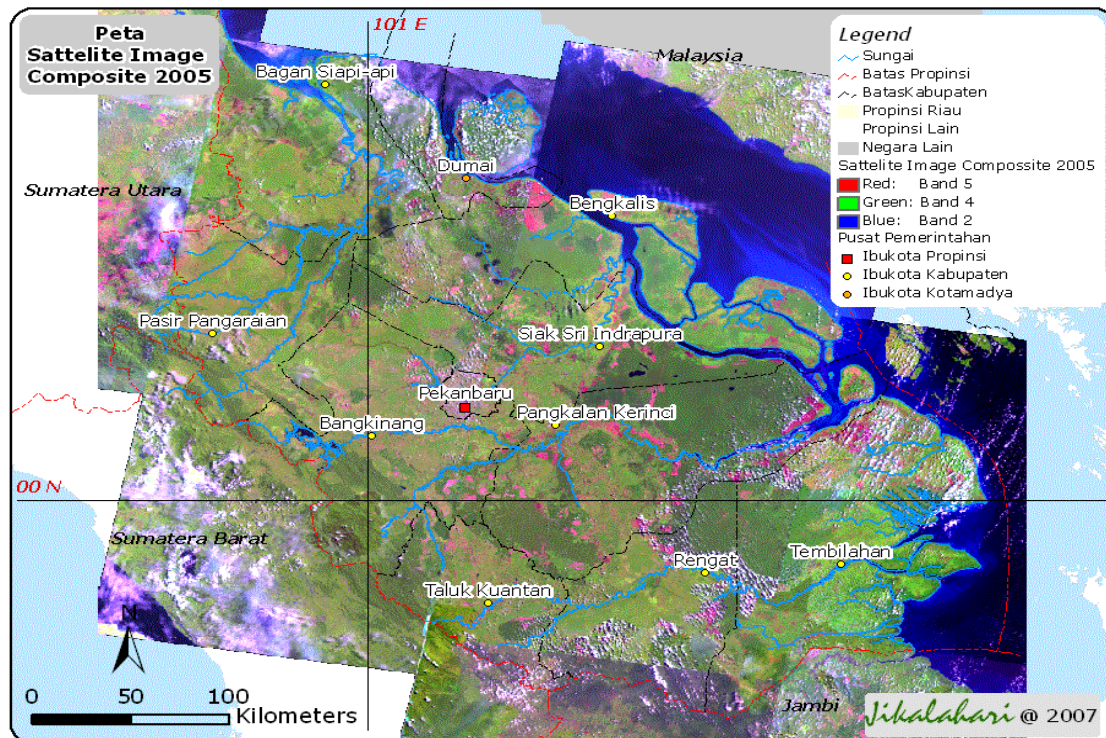
Penyimpangan yang terjadi dalam pemberian izin konsesi HPH, HTI dan perkebunan yang berada dalam kawasan lindung yang ditetapkan RTRWP 1994 adalah sebesar 808.610 Ha

Selain Pemberian izin/rekomendasi dalam kawasan lindung, kebijakan pemerintah dalam memberikan izin HTI dan Perkebunan merupakan faktor yang sangat dominan dalam merubah tutupan hutan alam yang ada di propinsi Riau.

KERTAS POSISI
BENCANA EKOLOGIS DI RIAU



Gambar . 7 Peta Hutan Alam Yang Tersisa Vs Perkebunan, HTI dan HPH Tahun 2006



Gambar. 8 Peta Citra Satelit Tutupan Hutan alam Riau Tahun 2005

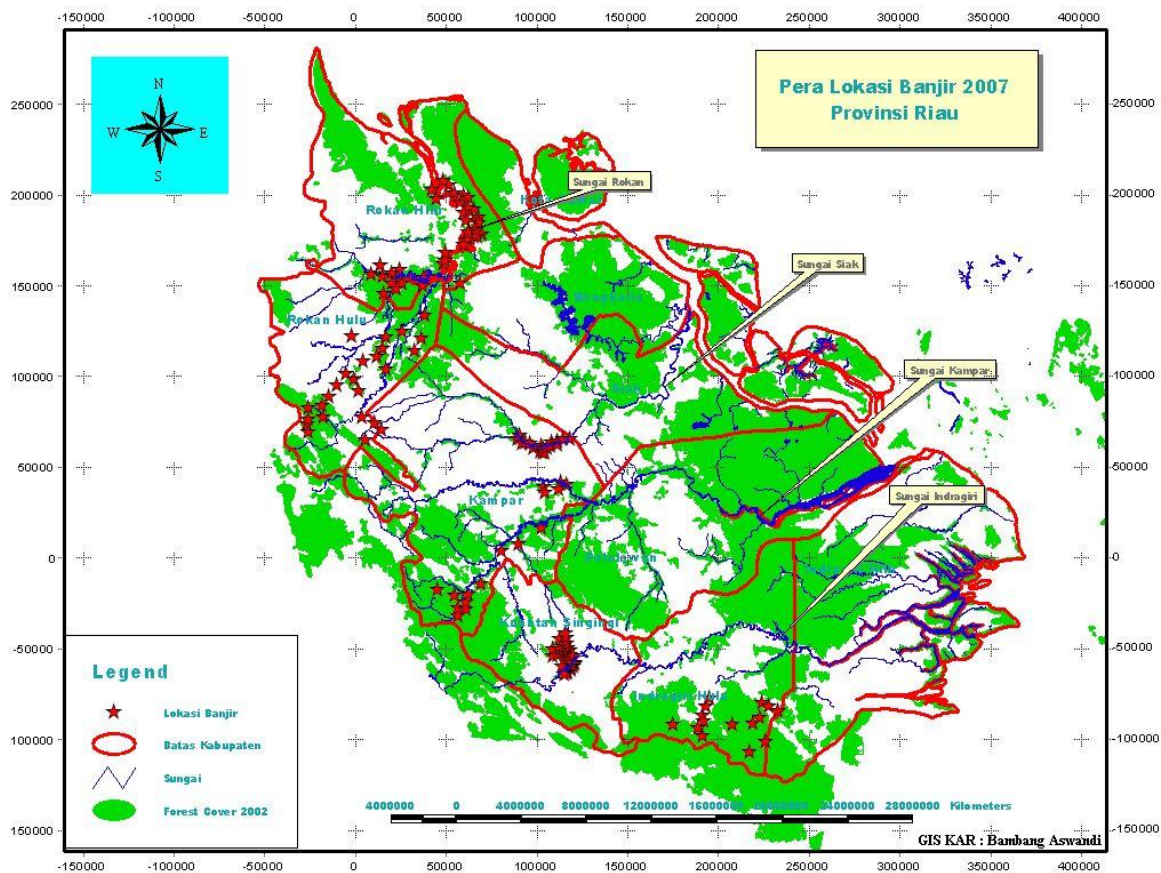
KERTAS POSISI BENCANA EKOLOGIS DI RIAU

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1990, tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, yang mengizinkan mengkonversi kawasan hutan produksi tetap menjadi Hutan Tanaman Industri maka bermunculanlah izin-izin pembukaan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri sampai tahun 2002 seluas 1,4 juta hektar

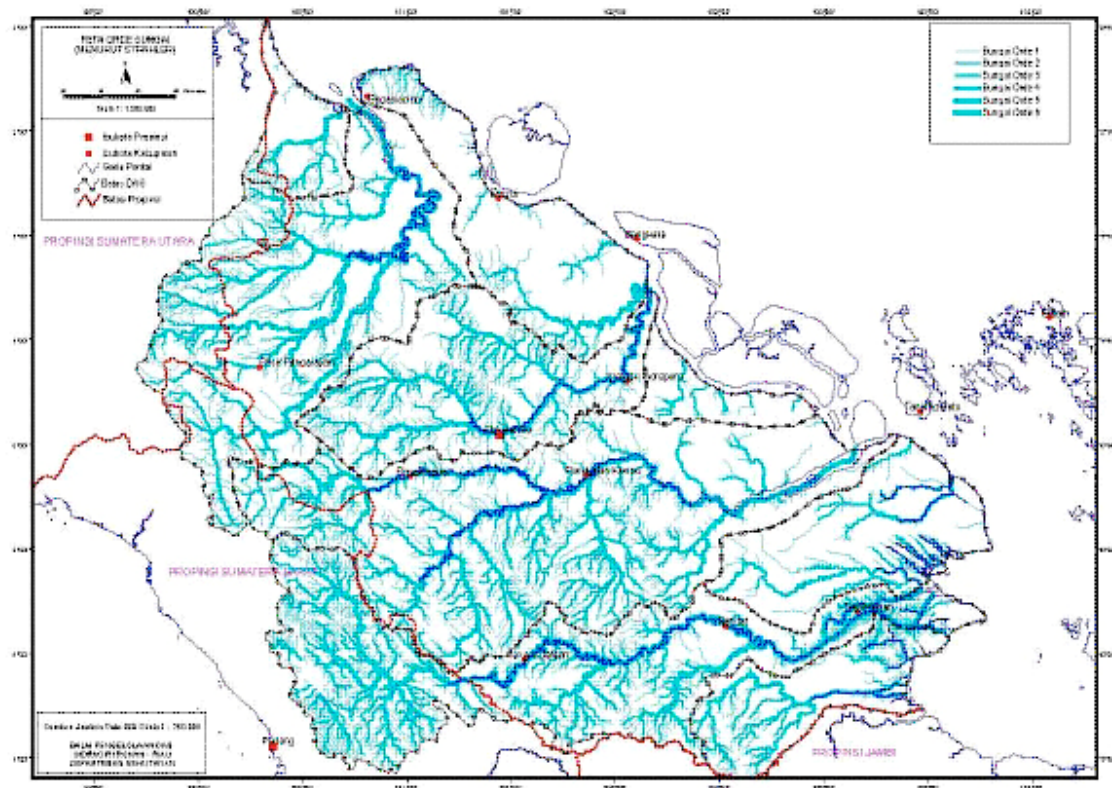
Disamping itu, dengan meningkatnya popularitas perkebunan kelapa sawit sebagai investasi masa depan maka pemerintah telah pula mengeluarkan izin perkebunan kelapa sawit skala besar seluas 1,6 juta Ha.

Dalam peta hutan alam yang tersisa versus perkebunan sawit, HTI dan HPH tahun 2006 kita dapat melihat lokasi-lokasi pemberian izin perkebunan sawit dan HTI dengan warna merah dan ungu disekitar DAS Indragiri, DAS Kampar, DAS Siak dan DAS Rokan.

Kondisi sisa tutupan hutan alam di Riau juga dapat kita lihat pada peta citra satelit tutupan hutan alam Riau tahun 2005 (gambar 8) dimana warna merah merupakan lahan terbuka, yang mendominasi sebagian besar wilayah DAS, warna hijau muda menunjukkan HTI dan perkebunan, sementara warna hijau tua menunjukkan tutupan hutan alam.



Gambar. 9 Peta Sebaran Banjir Di Riau, Desember 2006-Januari 2007



Gambar. 10 Peta Daerah Aliran Sungai di Propinsi Riau

Dari kondisi tutupan hutan alam di empat DAS besar di Riau kita dapat dengan mudah melihat bahwa terjadinya banjir merupakan akibat dari kebijakan konversi lahan untuk investasi yang mengabaikan faktor hidrologis.

4. Tinjauan Kerugian “Economic Valuations & Dampak Lanjutan”

Kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat banjir diperkirakan mencapai hingga ratusan milyar rupiah. Disebutkan bahwa dari 15 kabupaten yang ada dalam wilayah administratif Provinsi Riau, 9 diantaranya tertimpa banjir. Sebaran titik-titik banjir berbeda untuk setiap kabupaten.

Di Kabupaten Kampar banjir melanda 3 kecamatan yakni, Kecamatan Tambang di Desa Teluk Kenidai sebanyak 1.250 jiwa, Desa Kualu 350 jiwa dan Desa Tambang 1.265 jiwa. Kecamatan Kampar Kiri 650 KK dan Kecamatan Tapung Hilir sebanyak 30 KK. Ada 50 orang terserang penyakit dan 1 orang meninggal, sekurangnya ada 78 hectare kebun karet yang mengalami rusak berat (Rp 351.442.000)⁸.

Banjir di ROHIL melanda 5.364 jiwa di Kecamatan Batu Ampar, Rantau Kopar, Pujud dan Tanah Putih. 30 KK mengungsi, 1 meninggal dan 2 rumah hanyut, Di INHU di Desa Pasir Penyau dan Desa Kelayang yang cukup parah, di Kabupaten Pelalawan melanda 2.165 KK atau sekitar 6.283 jiwa, dan di Kotamadya Pekanbaru ada 6.150 KK yang tersebar di Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 370 KK, Kecamatan Payung Sekaki 126 KK, Kecamatan Rumbai 2.566 KK, Kecamatan Lima Puluh 1.020 KK, Kecamatan Rumbai Pesisir 1.624 KK

⁸ Komentar Kepala Dinas Perkebunan Kampar Ir Dharmawi di Riau Pos, 28 Desember 2006

dan Kecamatan Senapelan 444 KK, yang tersebar di 34 desa. Total bantuan yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 246 juta. Ketinggian air diperkirakan mencapai 1 – 3 meter dari ketinggian normal. Per 28 Desember 2006 Bencana Banjir di sembilan Kabupaten/ Kota di Riau telah menenggelamkan setidaknya 38.170 rumah.

Berdasarkan data Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Riau kerugian selama terjadinya banjir mencapai Rp 258 miliar dimana Kabupaten INHU mencapai Rp 87 miliar, ROHUL Rp 68 miliar, Kampar Rp 62,5 miliar, KUANSING Rp 27,5 miliar, ROHIL Rp 7 miliar, Pekanbaru Rp 4 miliar, INHIL Rp 1,5 miliar dan terakhir Pelalawan Rp 0,5 miliar.

4.1 Hitungan Kerugian Banjir di Kabupaten Kampar

Perhitungan ekonomi secara total memperlihatkan bahwa kerusakan yang terjadi pada ladang pertanian dan kebun penduduk telah menimbulkan kerugian sekitar Rp 22.7 miliar. Kerugian ini barulah merupakan kerugian di sektor pertanian yang bersifat langsung. Kerugian yang besar juga dialami oleh para petani sawah karena banjir telah menyebabkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp 2.92 miliar.

Kerusakan areal budidaya perikanan darat, terutama kolam ikan mencapai hingga 61 unit, dengan nilai kerugian sebesar Rp 305 juta. Keramba yang hanyut sekitar 196 unit dengan nilai kerugian sebesar Rp 1,764 miliar. Besarnya nilai kerugian tersebut ditambah dengan input-input untuk pembuatan peralatan dan tenaga kerja selama pembuatannya.

Ternak ayam yang mati relatif besar yakni secara keseluruhan diperkirakan mencapai hingga diatas 3.996 ekor. Dengan mengasumsikan bahwa satu ekor ayam rata-rata bernilai jual sebesar Rp 20.000 maka kerugian yang muncul mencapai Rp 79.940.000. Jumlah ternak kambing yang mati sekitar 181 ekor dengan kerugian sekitar Rp 162.900.000, dan begitu pula dengan sapi yang menyebabkan kerugian hingga Rp 1.7 miliar.

Kerugian yang ditimbulkan oleh rusaknya beberapa infrastruktur milik masyarakat ataupun infrastruktur umum adalah yang besar jika dibandingkan dengan kerugian yang terjadi di sektor-sektor lain. Tercatat sekitar 17 rumah rusak dan 25 unit rumah hanyut dengan kerugian Rp 747.999.998. Kerugian dari kerusakan jalan umum sepanjang hampir 20,8 kilometer mencapai Rp 2,6 miliar. Sekitar 34 unit jembatan rusak dengan nilai kerugian sebesar Rp 238.000.000,- 57 unit sekolah terendam, 19 unit puskesmas dan puskesmas pembantu, 20 unit rumah ibadah dan 2 dermaga rusak.

Penilaian kerugian langsung dilakukan dengan cara menginventarisasi seluruh kerugian yang dilaporkan per 29 Desember 2006 dan menetapkan nilai yang masuk akal terhadap setiap kerugian tersebut. Namun, dampak kerugian tersebut tidak hanya memiliki dampak langsung, karena nilai tersebut sangatlah *undervalued*.

Kerugian-kerugian tersebut memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) yang harus diperhitungkan karena nilai tersebut memiliki dampak yang lebih besar dan lebih luas. Dengan memperhitungkan dampak pengganda tersebut dengan setiap sub sektor yang menderita banjir maka akan didapat kerugian yang menyeluruh (*total lost*)

Analisa ini menghasilkan temuan yang berbeda dengan yang di himpun dan dikeluarkan oleh Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Provinsi Riau. Kerugian langsung yang diderita oleh Kabupaten Kampar adalah sebesar Rp 42.482.490.000 (Rp 42,482 Miliar). Ini belum termasuk memperhitungkan dampak pengganda masing masing sektor, sehingga didapat angka yang jauh lebih besar. Sebagai gambaran, analisa yang dilakukan ATTR dan WALHI

Riau, 2003. Kerugian langsung yang diderita oleh provinsi Riau akibat banjir adalah sebesar Rp 143,9 milyar rupiah dan setelah dimasukan dengan dampak pengganda masing masing sektor didapat angka yang jauh lebih besar, yaitu Rp 793,3 milyar.

Hal yang juga harus dicermati adalah adanya pos-pos pengeluaran di APBD propinsi Riau maupun APBD kabupaten-kabupaten di Riau yang membengkak, terutama tujuh pos penting pengeluaran pembangunan dalam pembangunan sektor publik yang memiliki keterkaitan yang erat dengan fenomena banjir di Riau. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian dan kehutanan, sektor sumber daya air dan irigasi, sektor transportasi, sektor pembangunan daerah dan pemukiman, sektor lingkungan hidup dan tata ruang, sektor kesehatan, kesejahteraan social, peranan wanita, anak dan remaja, dan sektor perumahan dan pemukiman.

C. APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dari bencana ekologis yang terjadi, maka persoalan ini harus disikapi secara bersama-sama dengan menjalankan peran dan tanggungjawab para pihak. Agar bencana yang terjadi tidak menimbulkan bencana baru yang akhirnya berputar menjadi sebuah lingkaran yang tak berujung. Rencana relokasi masyarakat dan proyek infrasytuktur bukan solusi ampuh untuk mengurangi masalah bencana, karena persoalannya ada pada kebijakan yang telah salah arah serta ke-enggan pemerintah dalam bersikap. Untuk itu untuk mengurangi resiko bencana yang lebih besar, maka pemerintah harus segera melakukan tindakan ;

1. Mengeluarkan kebijakan Moratorium penebangan hutan alam yang tersisa
2. Meninjau ulang semua rencana investasi skala besar berbasis lahan yang berimplikasi kepada konversi hutan alam yang tersisa dan merubah bentang alam
3. Konsep RTRWP Riau tidak lagi bisa mengacu kepada batasan administrasi, namun harus harus mengacu kepada konsep BIOREGION yang menghubungkan kepentingan hulu-hilir sebuah kawasan
4. Membentuk sebuah sistem manajemen informasi dan penanggulangan bencana, dengan melakukan inventarisir dan menginformasikan secara berkala kepada masyarakat tentang wilayah-wilayah rawan bencana di Riau serta tindakan yang harus diambil, untuk pencegahan dan pengendalian resiko bencana di masyarakat
5. Pemerintah harus berani mengakui kegagalan dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang eksploitatif terhadap sumber daya alam yang bermuara kepada bencana ekologis di setiap tahunnya

Sikap dan tindakan yang harus dilakukan segera oleh pemerintah sudah seharusnya di kontrol oleh semua elemen masyarakat dengan mulai memberanikan diri untuk menuntut pertanggung gugatan pemerintah dan perusahaan terhadap kerugian yang dialami dari bencana ekologis yang terjadi setiap tahunnya dan berlaku mundur.

Masyarakat juga harus mulai berpikir untuk memilih dan mengkritisi setiap kepala daerah yang akan duduk di kursi pemerintahan agar mereka berani mengeluarkan kebijakan Moratorium penebangan dan menghentikan segala bentuk investasi yang ekplotatif terhadap sumber daya alam.

Para akademisi juga sudah saatnya menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan melakukan riset-riset yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan agar bisa memberikan

kontribusi terhadap pengambilan kebijakan yang berpihak kepada lingkungan dan kemaslahatan masyarakat Riau

D. PENUTUP

Bencana ekologis yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir di Riau sesungguhnya adalah hasil rekayasa ekonomi politik antara penguasa yang dilakoni oleh para pembuat kebijakan dengan pengusaha yang memiliki modal besar.

Investasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terbukti hanya jargon pembangunan, bencana kabut asap dan banjir berulang-ulang terjadi disepanjang tahun dan telah pula menyebabkan kerugian yang sangat luar biasa, namun sampai dengan saat ini hampir tidak ada kebijakan dan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk merestorasi kerusakan lingkungan yang terjadi.

Pemerintah malah membuka peluang sebesar-besarnya kepada para investor untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam seluas-luasnya, walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa seharusnya tidak ada lagi hutan alam yang bisa dikonversi, bahwa kebijakan tata ruang selama ini tidak pernah melibatkan masyarakat local dan tidak berbasiskan kepada kepentingan masyarakat dibagian hulu dan hilir kawasan namun lebih cenderung membabi buta guna mengamankan investasi, fenomena inilah yang kita sebut dengan "Extra Ordinary Crime by State".

Kontribusi pikiran, sikap kritis dan segala daya upaya segenap rakyat Riau sangat menentukan arah perubahan pembangunan untuk kesejahteraan dimasa mendatang.

----- o0o -----